



Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Menurunkan Angka Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Bone Bolango

Dewi Humaira Maspeke
Fajriani As
Fasya Toliu
Jamila A. Pakaya
Moh. Wahyu Toana
Oktaviani Djibran
Siti Nurdea Ananda Putri Djafar
Sulistiawati Abdullah
Magvirah El Walidayni Kau
Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: [Jln. Prof. Ing. B.J. Habibie, Moutong, Kec. Tilongkabila, Kab. Bone Bolango, Gorontalo 96119](#)

Korespondensi penulis: dewi_s1sastrainggris@mahasiswa.ung.ac.id

Abstract. *Out-of-School Children (OOSC), school dropouts, and graduates who do not continue their education remain challenges in educational development in Bone Bolango Regency. This study aims to examine the role of the Bone Bolango Regency Office of Education and Culture in reducing the rates of OOSC, dropouts, and non-continuing graduates through the use of Verification and Validation (Verval) data from Pusdatin of the Ministry of Primary and Secondary Education and actual field conditions. The research employed a descriptive qualitative approach, using in-depth interviews with the Head of the Office of Education and Culture and Subdistrict Education Coordinators, supported by quantitative data from the Verval system. The findings indicate that the Office has implemented several efforts, including strengthening non-formal education services through community learning centers (PKBM), conducting data collection and community outreach, and planning affirmative programs such as scholarships and school uniform assistance. However, these efforts have not been fully effective due to data inaccuracies, weak cross-sector coordination, and the absence of a strong early detection system at the school level.*

Keywords: School Dropouts; Out-of-School Children (OOSC); Drop Out; Bone Bolango Regency

Abstrak. Anak Tidak Sekolah (ATS), putus sekolah (Drop Out/DO), dan lulusan yang tidak melanjutkan pendidikan (LTM) masih menjadi tantangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bone Bolango, khususnya pada jenjang PAUD, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di bawah kewenangan pemerintah kabupaten. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango dalam menekan angka ATS, DO, dan LTM melalui pemanfaatan data Verifikasi dan Validasi (Verval) ATS Pusdatin Kemendikdasmen serta kondisi faktual di lapangan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam terhadap Kepala Dinas Pendidikan dan Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan, serta didukung data kuantitatif dari sistem Verval. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan berbagai upaya, seperti penguatan layanan pendidikan nonformal melalui PKBM, pendataan dan penjangkauan langsung, serta program afirmatif berupa beasiswa dan bantuan seragam. Namun, implementasi kebijakan belum optimal akibat ketidaktepatan data ATS, lemahnya koordinasi lintas sektor, dan sistem deteksi dini yang belum kuat. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan data yang lebih akurat, kolaborasi lintas sektor berkelanjutan, serta strategi intervensi yang responsif terhadap kondisi sosial masyarakat.

Kata Kunci: Anak Putus Sekolah; Anak Tidak Sekolah (ATS); Putus Sekolah; Kabupaten Bone Bolango

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan landasan utama dalam pembangunan sumber daya manusia dan menjadi salah satu indikator kunci keberhasilan pembangunan suatu daerah. Sebagaimana

dikemukakan oleh UNESCO (2014), "Pendidikan adalah fondasi pembangunan berkelanjutan dan kunci untuk mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi." Pemerintah daerah melalui perangkat teknis memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh akses pendidikan yang layak sejak usia dini hingga jenjang menengah pertama. Dalam konteks ini, keberadaan Anak Tidak Sekolah (ATS), Drop Out (DO), serta Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) masih menjadi tantangan serius yang dihadapi berbagai kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Bone Bolango. Menurut UNICEF (2019), "Anak-anak yang terputus dari pendidikan formal menghadapi risiko lebih tinggi terhadap kemiskinan, eksploitasi, dan keterbatasan dalam berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi."

Sebagai instansi yang berwenang dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta pengendalian mutu untuk menekan angka anak putus sekolah. Adapun jenjang SMA/SMK berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo, sehingga tidak termasuk dalam fokus kajian penelitian ini. Data terbaru hasil Verifikasi dan Validasi (Verval) ATS Pusdatin Kemendikdasmen menunjukkan bahwa Kabupaten Bone Bolango masih menghadapi tantangan signifikan terkait keberadaan peserta didik yang tidak mengikuti pendidikan pada jalur formal. Berdasarkan data Drop Out (DO) tercatat 877 anak, sementara data Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) berjumlah 862 anak pada jenjang PAUD, SD, dan SMP.

Beberapa kecamatan dengan angka tertinggi di antaranya Tilongkabila, Bonepantai, Bone, dan Kabila, yang menunjukkan jumlah DO dan LTM yang relatif besar dibanding kecamatan lainnya. Fenomena anak putus sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi sosial ekonomi, motivasi belajar, dukungan keluarga, hingga faktor geografis dan ketersediaan layanan pendidikan di lingkungan sekitar. Hal ini sesuai dengan pendapat Coleman (1988) yang menegaskan bahwa "Kondisi sosial ekonomi keluarga merupakan determinan utama dalam keberlangsungan pendidikan anak." Menurut Abdul Mu'ti (2025), "Faktor ekonomi menjadi penyebab paling banyak ditemukan siswa putus sekolah, di mana banyak keluarga tidak mampu membiayai pendidikan anak-anaknya hingga tingkat SMA sehingga siswa memilih berhenti sekolah dan bekerja membantu ekonomi keluarga".

Kondisi inilah yang menuntut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango untuk melakukan intervensi komprehensif melalui penguatan regulasi, pengelolaan data berbasis Verval, program penjangkauan (reach out), layanan pendidikan alternatif, serta sinergi lintas sektor terutama dengan desa/kelurahan dan organisasi masyarakat. Menurut Fullan (2007), "Keberhasilan reformasi pendidikan sangat tergantung pada kolaborasi antar pemangku kepentingan dan penguatan sistem yang berkelanjutan." Penelitian di Kota Pekalongan (2025) menyatakan, "Faktor penyebab ATS meliputi ekonomi, sosial, dan geografis, sehingga upaya penanganan ATS perlu dilakukan melalui kolaborasi multi-stakeholder, penguatan kebijakan, dan pengembangan kapasitas masyarakat".

Jazziray dari Kemenko PMK (2023) menegaskan, "Sustainable Development Goals (SDGs) mengamanatkan agar semua anak tanpa kecuali dipenuhi hak sosial dan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, sehingga pemerintah daerah menjadi kunci dalam peningkatan akses layanan pendidikan". PP No. 13 Tahun 2020 tentang pendidikan inklusi

di Indonesia menegaskan, "Pelaksanaan pendidikan inklusi dapat berjalan dengan baik salah satunya adalah kebijakan menyiapkan guru yang lebih serius untuk mengajar anak berkebutuhan khusus, sehingga memastikan setiap anak mendapat kesempatan belajar yang setara".scribd+2

Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango dalam menurunkan angka ATS, DO, dan LTM pada jenjang PAUD, SD, dan SMP, dengan memanfaatkan data empiris dari Verval Pusdatin Kemendikdasmen serta melihat dinamika yang terjadi di lapangan. Diharapkan, hasil kajian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk memperkuat akses dan pemerataan layanan pendidikan di Kabupaten Bone Bolango.

KAJIAN TEORITIS

a. Pengantar Kajian Teoritis

Kajian teoritis ini menguraikan landasan konseptual mengenai peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menurunkan angka anak putus sekolah (drop out), khususnya di Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan abstrak jurnal "Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Menurunkan Angka Anak Putus Sekolah di Kabupaten Bone Bolango" (Universitas Negeri Gorontalo, 2025), masalah Anak Tidak Sekolah (ATS), drop out, dan lulusan tidak melanjutkan pendidikan (LTM) menjadi tantangan utama di jenjang PAUD, SD, dan SMP yang berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten. Kajian ini mengintegrasikan teori pendidikan, administrasi publik, dan kebijakan sosial untuk menjelaskan peran dinas pendidikan sebagai aktor utama dalam intervensi pendidikan inklusif.

a. Konsep Anak Putus Sekolah dan ATS

Anak putus sekolah didefinisikan sebagai anak usia sekolah yang meninggalkan pendidikan formal sebelum menyelesaikan jenjang yang wajar, sementara ATS mencakup anak di luar sistem pendidikan formal sama sekali (Kemendikbud, 2020). Teori human capital dari Gary Becker (1964) menekankan bahwa putus sekolah mengurangi modal manusia, menghambat pembangunan ekonomi daerah seperti Bone Bolango yang bergantung pada sumber daya alam dan pariwisata budaya.

Faktor penyebab meliputi kemiskinan, akses geografis, budaya, dan kualitas layanan pendidikan, sebagaimana dijelaskan dalam model ekologi Bronfenbrenner (1979). Di tingkat mikro (keluarga), prioritas ekonomi mendorong anak bekerja; meso (sekolah) menunjukkan kurangnya deteksi dini; dan makro (kebijakan kabupaten) melibatkan koordinasi dinas pendidikan.

b. Landasan Hukum dan Kebijakan Pendidikan

Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mewajibkan pemerintah daerah menjamin wajib belajar 12 tahun. Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 tentang Sistem Verval ATS mendukung pengelolaan data akurat, sebagaimana digunakan dalam jurnal tersebut. Kebijakan afirmatif seperti beasiswa dan bantuan seragam selaras dengan RPJMD Kabupaten Bone Bolango yang menargetkan penurunan angka putus sekolah melalui pendidikan non-formal seperti PKBM.

Teori good governance (Osborne & Gaebler, 1992) menuntut dinas berperan sebagai fasilitator, regulator, dan inovator, termasuk penjangkauan masyarakat dan kolaborasi lintas sektor.

c. Teori Peran Dinas Pendidikan dalam Pencegahan Drop Out

Teori Administrasi Pendidikan Publik

Menurut Bush (2011), dinas pendidikan berfungsi sebagai perencana strategis, pelaksana program, dan evaluator. Di Bone Bolango, ini terwujud dalam pendataan lapangan, program beasiswa, dan penguatan PKBM untuk mengurangi ATS, seperti diuraikan dalam jurnal (Universitas Negeri Gorontalo, 2025).

d. Teori Intervensi Sosial

Model intervensi multilevel dari Heckman (2006) menyoroti pencegahan dini melalui deteksi ATS di sekolah dasar. Kendala seperti ketidaktepatan data dan koordinasi lemah dapat diatasi dengan sistem informasi berbasis teknologi seperti EMIS (Education Management Information System).

e. Pendekatan Ekosistem Pendidikan

Fullan (2007) dalam teori change management pendidikan mengusulkan kolaborasi multi-stakeholder: dinas (kebijakan), sekolah (deteksi dini), dan masyarakat (penjangkauan). Strategi responsif terhadap kondisi sosial Bone Bolango—seperti kemiskinan pedesaan—memerlukan program adaptif berbasis data Verval.

Teori Utama	Fokus Peran Dinas	Relevansi dengan Bone Bolango
Human Capital (Becker, 1964)	Investasi pendidikan inklusif	Mengurangi LTM melalui beasiswa
Ekologi (Bronfenbrenner, 1979)	Intervensi multilevel	Penjangkauan keluarga dan sekolah
Good Governance (Osborne, 1992)	Koordinasi lintas sektor	Atasi keterbatasan antarinstansi
Change Management (Fullan, 2007)	Deteksi dini dan evaluasi	Perbaiki akurasi data Verval

Implikasi dan Rekomendasi Teoritis

Kajian ini menegaskan bahwa optimalisasi peran dinas memerlukan penguatan data-driven decision making dan sinergi dengan dinas sosial serta kecamatan. Jurnal tersebut (Universitas Negeri Gorontalo, 2025) mendukung teori bahwa tanpa sistem deteksi dini, upaya

afirmatif kurang efektif. Untuk konteks Indonesia timur seperti Bone Bolango, integrasi nilai budaya lokal dalam pendidikan non-formal dapat meningkatkan partisipasi.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial terkait permasalahan anak putus sekolah dan peranan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat kabupaten melalui perspektif para pemangku kebijakan. Penelitian kualitatif deskriptif juga memungkinkan peneliti menggambarkan kondisi apa adanya, sesuai realitas di lapangan, tanpa melakukan manipulasi terhadap situasi yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengarahkan proses pengumpulan data dan menafsirkan makna di balik informasi yang diperoleh (Sugiyono, 2019). Informan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, kewenangan, dan pengalaman yang relevan terhadap objek kajian. Terdapat dua informan utama, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan Kecamatan. Kepala Dinas dipilih karena memiliki otoritas dalam merumuskan, menetapkan, serta mengevaluasi kebijakan pendidikan yang berdampak langsung pada upaya penanggulangan anak putus sekolah. Sementara itu, Korwil dipilih karena memiliki pemahaman yang lebih dekat dengan kondisi sekolah di wilayahnya, termasuk permasalahan yang dihadapi satuan pendidikan dan peserta didik, sehingga informasi yang diberikan bersifat faktual dan sesuai dengan kondisi lapangan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri atas data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan kedua informan untuk menggali informasi mengenai apa saja peranan atau program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan dalam menekan angka anak putus sekolah, serta tantangan yang dihadapi. Sementara itu, data kuantitatif diperoleh dari sistem VERVAL (Verifikasi dan Validasi Data Pendidikan), khususnya data yang mencatat jumlah anak putus sekolah di tingkat kabupaten. Data VERVAL digunakan sebagai penguat terhadap temuan kualitatif, sehingga analisis yang dilakukan tidak hanya bertumpu pada informasi naratif, tetapi juga didukung oleh angka dan fakta resmi yang telah tervalidasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keberlanjutan pendidikan masih menjadi masalah besar bagi pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan di Kabupaten Bone Bolango, namun masih ada tantangan untuk memastikan bahwa semua anak usia sekolah terus mendapatkan pendidikan. Data dari sistem Verval ATS Kemendikdasmen menunjukkan bahwa masih ada anak yang tercatat yang tidak masuk sekolah atau tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat bertanggung jawab atas kondisi ini karena merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi layanan pendidikan. Berikut Verval ATS Kemendikdasmen mencatat jumlah anak putus sekolah di dari SD hingga SMP di Kabupaten Bone Bolango.

Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan Wilayah Kabupaten Bone Bolango

No	Kecamatan	Dasar (SD)	Pertama (SMP)	Total
1	Kec. Tapa	14	20	34
2	Kec. Kabila	38	44	82
3	Kec. Suwawa	24	22	46
4	Kec. Bonepantai	55	48	103
5	Kec. Bulango Utara	15	11	26
6	Kec. Tilongkabila	39	57	96
7	Kec. Botupingge	9	11	20
8	Kec. Kabila Bone	43	36	79
9	Kec. Bone	32	38	70
10	Kec. Bone Raya	15	19	34
11	Kec. Bulango Selatan	7	13	20
12	Kec. Bulango Timur	7	11	18
13	Kec. Bulango Ulu	35	24	59
14	Kec. Suwawa Selatan	22	21	43
15	Kec. Suwawa Timur	11	14	25
16	Kec. Suwawa Tengah	13	12	25
17	Kec. Bulawa	40	35	75
18	Kec. Pinogu	2	5	7

Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Menurunkan Angka Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Bone Bolango

-	Residu	0	0	0
Jumlah		421	441	862

Sumber: Verval ATS Kemendikdasmen

Tabel Data ATS - Drop Out Wilayah Kabupaten Bone Bolango

No	Kecamatan	PAUD	Dasar (SD)	Pertama (SMP)	Total
1	Kec. Tapa	0	17	12	29
2	Kec. Kabila	0	37	44	81
3	Kec. Suwawa	0	18	33	51
4	Kec. Bonepantai	0	41	30	71
5	Kec. Bulango Utara	0	17	16	33
6	Kec. Tilongkabila	0	47	44	91
7	Kec. Botupingge	0	7	11	18
8	Kec. Kabila Bone	0	41	35	76
9	Kec. Bone	0	42	71	113
10	Kec. Bone Raya	0	21	29	50
11	Kec. Bulango Selatan	0	15	17	32
12	Kec. Bulango Timur	0	10	14	24
13	Kec. Bulango Ulu	0	17	20	37
14	Kec. Suwawa Selatan	0	22	12	34
15	Kec. Suwawa Timur	0	23	11	34
16	Kec. Suwawa Tengah	0	26	17	43

*Peran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Dalam Menurunkan Angka
Anak Putus Sekolah Di Kabupaten Bone Bolango*

17	Kec. Bulawa	0	25	18	43
18	Kec. Pinogu	0	6	11	17
-	Residu	0	0	0	0
Jumlah		0	432	445	877

Sumber: Verval ATS Kemendikdasmen

Hasil dari sistem Verval Kemendikdasmen menunjukkan bahwa masalah keberlanjutan pendidikan di Kabupaten Bone Bolango masih perlu ditangani dengan serius. Angka ini menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi tidak hanya sebatas siswa aktif yang berhenti sekolah, tetapi juga anak lulusan yang enggan melanjutkan pendidikan. Gambaran data ini menunjukkan perlunya tindakan yang sistematis dari Dinas Pendidikan sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengendalikan capaian wajib belajar di tingkat kabupaten. Untuk menjamin bahwa penanganan berjalan efektif dalam situasi seperti ini, langkah-langkah yang lebih terarah, responsif, dan berbasis pemetaan wilayah menjadi sangat penting.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, upaya untuk menangani masalah putus sekolah di Bone Bolango sudah mulai dilakukan, meskipun belum sepenuhnya optimal. Dinas telah mengembangkan tiga langkah utama yang menjadi arah kebijakan instansi. Pertama, memperkuat unit pendidikan non-formal seperti PKBM dan Sanggar Kegiatan Belajar sebagai alternatif bagi anak-anak yang tidak dapat kembali ke sekolah formal. Melalui program Paket A, B, dan C, dinas berupaya memastikan bahwa anak-anak yang telah putus sekolah masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan mereka. Langkah ini penting mengingat setiap anak memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda.

Langkah kedua yang dijelaskan oleh Kepala Dinas adalah pelaksanaan survei atau pemantauan untuk memperoleh data yang lebih akurat di lapangan. Pendekatan ini dilakukan untuk memverifikasi data Verval dengan fakta yang ditemukan secara langsung di lapangan, sekaligus melacak anak-anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar di unit pendidikan. Melalui kegiatan ini, dinas dapat melakukan jangkauan dan memberikan bantuan kepada keluarga dan anak-anak, dengan tujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Pendekatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membuka dialog langsung dengan masyarakat sehingga penanganan masalah menjadi lebih manusiawi dan sesuai dengan konteks di setiap wilayah.

Selain itu, Kepala Dinas menyatakan bahwa dinas tersebut juga sedang menyiapkan program afirmasi untuk keluarga yang memiliki anak yang putus sekolah. Program ini dirancang untuk menangani berbagai kondisi yang mungkin dihadapi anak-anak, mulai dari masalah ekonomi, keterbatasan akses ke sekolah, kurangnya motivasi, hingga kurangnya informasi tentang pendidikan. Meskipun sejumlah upaya telah dimulai tahun ini, Kepala Dinas mengakui bahwa implementasinya belum optimal. Oleh karena itu, perlu meningkatkan kualitas pengumpulan data, memperkuat koordinasi, dan melibatkan semua pihak terkait agar penanganan putus sekolah dapat dilakukan secara lebih terukur dan terarah.

Selain itu, hasil wawancara dengan Koordinator Wilayah (Korwil) juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi operasional di lapangan. Beliau mengatakan bahwa, meskipun dinas telah menciptakan sejumlah program, implementasinya belum sepenuhnya dimaksimalkan. Salah satu langkah yang sedang diambil saat ini adalah menindaklanjuti data ATS dengan bantuan operator sekolah. Untuk memastikan bahwa jumlah ATS yang muncul di dashboard kementerian benar-benar mencerminkan situasi sebenarnya, koordinasi ini diinisiasi karena hanya operator yang dapat mengakses sistem. Koordinator Wilayah menemukan dari beberapa kunjungan lapangan bahwa angka ATS seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan, sehingga pengumpulan data akan dilakukan berbasis nama (by name) agar intervensi dapat lebih terarah.

Selain menjelaskan data, koordinator wilayah tersebut juga menyoroti upaya dinas terkait dalam memberikan beasiswa dan bantuan seragam sekolah. Beliau menjelaskan bahwa sejak tahun lalu, anak-anak di Pinogu telah menerima beasiswa khusus karena wilayah tersebut dianggap memiliki risiko putus sekolah yang lebih tinggi, meskipun tingkat putus sekolahnya tidak yang tertinggi. Sebaliknya, bantuan seragam sekolah yang akan diberikan secara komprehensif tahun ini dianggap sebagai langkah yang tepat untuk mengurangi hambatan yang tidak terlihat dalam statistik namun memiliki dampak signifikan terhadap kelangsungan pendidikan. Selain itu, ia menyatakan bahwa lembaga tersebut bahkan menggunakan sumbangan pegawai (infaq Jumat berkah) untuk membantu siswa yang berisiko putus sekolah sebelum anggaran resmi tersedia, menunjukkan bahwa intervensi sejauh ini lebih bergantung pada inisiatif lapangan daripada program struktural.

Selain itu, Korwil menyatakan bahwa dalam waktu dekat, upaya untuk menangani putus sekolah akan difokuskan pada peningkatan kerja sama lintas sektor. Karena masalah putus sekolah sering kali terkait dengan masalah sosial yang tidak dapat ditangani oleh sekolah atau lembaga pendidikan saja, pemerintah desa, layanan sosial, dan lembaga perlindungan perempuan dan anak harus terlibat. Korwil menyatakan bahwa ada rencana untuk memberikan bimbingan teknis bagi guru pada tahun depan. Hal ini akan membantu guru mengenali kasus ATS dengan lebih baik dan memahami cara yang tepat untuk berkomunikasi dengan keluarga siswa. Diharapkan program ini dapat meningkatkan sistem deteksi dini dan memperkuat peran sekolah sebagai pusat pengendalian putus sekolah. Karena pemerintah desa memiliki pemahaman langsung tentang kondisi warganya, kolaborasi dengan pemerintah desa akan menjadi fokus utama. Hal ini karena pemerintah desa dapat membantu mengumpulkan data yang lebih akurat dan memfasilitasi penanganan kasus secara lebih efisien.

Secara keseluruhan, wawancara dengan Kepala Dinas dan Koordinator Wilayah menunjukkan bahwa upaya untuk mengatasi angka putus sekolah di Kabupaten Bone Bolango telah berkembang ke arah yang lebih sistematis, meskipun masih ada beberapa hambatan dalam implementasinya. Untuk memastikan akurasi data ATS, pemerintah telah mulai menyiapkan landasan melalui perbaikan dalam pendidikan non-formal, program beasiswa, bantuan seragam sekolah, dan pengumpulan data berbasis nama. Sementara itu, Koordinator Regional menekankan bahwa kerja sama di tingkat dasar sangat penting, dan sekolah harus lebih peka dalam mengidentifikasi siswa yang putus sekolah. Menangani putus sekolah memerlukan kerja sama lintas sektor dan strategi berkelanjutan agar penanganan yang dilakukan benar-benar menjangkau anak-anak yang benar-benar membutuhkan. Hal ini ditunjukkan oleh kombinasi kebijakan struktural dari dinas dan pendekatan operasional dari Koordinator Wilayah.

KESIMPULAN

Dari hasil yang ditemukan Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango dalam mengurangi angka putus sekolah telah berjalan melalui beberapa kebijakan dan program, namun implementasinya masih belum optimal. Beberapa kebijakan dan Program seperti, pengadaan beasiswa, pembagian seragam pun baru dilakukan Pada Tahun 2025, Melalui wawancara bersama Kepala Dinas dan Korwil, masalah anak putus sekolah ini akan terus menjadi perhatian utama, di mana Dinas Pendidikan berkomitmen untuk memprioritaskan penanganannya serta telah merancang sejumlah program strategis yang difokuskan pada peningkatan akurasi data anak putus sekolah. Di tingkat operasional, ditemukan bahwa masalah utama terletak pada ketidaktepatan data ATS, keterbatasan koordinasi antara instansi, serta minimnya sistem deteksi dini di sekolah, hal ini menjadi hambatan bagi dinas dalam mengeksekusi masalah anak putus sekolah ini. Data yang dimiliki saat ini setelah di tinjau langsung di lapangan ternyata memiliki perbedaan, Hal ini membuat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan rencana untuk meninjau kembali angka putus sekolah pada tahun berikutnya serta menyusun program bimbingan teknis bagi guru guna memperkuat kapasitas sekolah dalam melakukan deteksi dini dan penanganan kasus anak putus sekolah. Dari hasil penelitian ini, angka putus sekolah di kabupaten Bone Bolango masih tergolong tinggi, percepatan pendataan perlu dilakukan agar realisasi program dapat dilaksanakan secara optimal, terutama pada wilayah yang memiliki angka putus sekolah, dan Dropout yang tinggi, serta pencegahan pada wilayah yang beresiko. Pengadaan sosialisasi pada masyarakat, terutama pada orang tua juga diperlukan agar, Masyarakat tidak menganggap putus sekolah sebagai hal yang biasa, mengingat fakta lapangan menunjukkan bahwa banyak anak yang berhenti sekolah bukan karena ketidakmampuan belajar, tetapi karena harus bekerja membantu perekonomian keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayati, S.N. (2016). Pengaruh Pendekatan Keras dan Lunak Pemimpin Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Potensi Mogok Kerja Karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57-66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>.
- Abdul Mu'ti. (2025, Juni 29). *Abdul Mu'ti ungkap tiga faktor anak putus sekolah, dari ekonomi hingga psikologis*. Medcom.id. [https://www.medcom.id/pendidikan/news-
pendidikan/JKR5p97k-abdul-mu-ti-ungkap-tiga-faktor-anak-putus-sekolah-dari-
ekonomi-hingga-](https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/JKR5p97k-abdul-mu-ti-ungkap-tiga-faktor-anak-putus-sekolah-dari-ekonomi-hingga-)
- Baihakqi, A. (2025). Implementasi program penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Tegal. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(1), 1–12. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/1598/1741>
- Becker, G. S. (1964). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*. National Bureau of Economic Research; Columbia University Press. <https://search.library.wisc.edu/catalog/999479129602121/cite>
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Harvard University Press. [https://greenpacks.org/how-to-cite-bronfenbrenner-s-
ecological-systems-theory/](https://greenpacks.org/how-to-cite-bronfenbrenner-s-ecological-systems-theory/)
- Bush, T. (2011). *Theories of educational leadership and management* (4th ed.). SAGE Publications. [https://books.google.com/books/about/Theories_of_Educational_Leadership_and_M.ht
ml?id=-srXDwAAQBAJ](https://books.google.com/books/about/Theories_of_Educational_Leadership_and_M.html?id=-srXDwAAQBAJ)
- Fullan, M. (2007). *Change theory: A force for school improvement*. [https://michaelfullan.ca/wp-
content/uploads/2016/06/13396072630.pdf](https://michaelfullan.ca/wp-content/uploads/2016/06/13396072630.pdf)

- Jazziray, A. (2023). *Kemenko PMK kawal pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. <https://www.kemendiknas.go.id/kemenko-pmk-kawal-pelaksanaan-kebijakan-pendidikan-inklusif>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman verifikasi dan validasi Anak Tidak Sekolah (ATS)*. <https://disdik.lbbkkab.go.id/berita/detail/panduan-verifikasi-anak-tidak-sekolah-ats>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. <https://pep.pps.uny.ac.id/sites/pep.pps.uny.ac.id/files/UU%20Nomor%2020%20Tahun%202003-Sistem%20Pendidikan%20Nasional.pdf>
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector*. Addison-Wesley.
- Pemerintah Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendidikan Inklusif*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. https://www.bphn.go.id/produk_hukum/produk_hukum_detil/2020/PP/PP_13_2020
- Penelitian di Kota Pekalongan. (2025). Faktor penyebab Anak Tidak Sekolah (ATS) dan upaya penanganan di Kota Pekalongan. *Jurnal Pendidikan dan Masyarakat*, 10(2), 45–58. <https://id.scribd.com/document/833340227/779-Article-Text-1372-1-10-20241230>
- Universitas Negeri Gorontalo. (2025). Peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menurunkan angka anak putus sekolah di Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*.